

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Ayo Ajukan Surat Keterangan, Bukti Anda Adalah UMKM*. Retrieved 17 Maret 2021, from <https://stats.pajak.go.id/artikel/ayu-ajukan-surat-keterangan-bukti-anda-adalah-umkm>.
- Ermawati,N.&Afifi,Z.(2018).*Modul Kuliah Mari Menjadi Wajib Pajak Yang Patuh*. Yogyakarta : Universitas Muria Kudus
- Kamaroellah,R,A. (2017). *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan*. 4 (1), 82-103
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia: 544/KMK.04/2000. Tanggal: 28-12-2000 Tentang Kepatuhan Pajak. 22 Desember 2000. Berita Negara Republik Indonesia.
- Khairiyah,Y,R.,Akhmadi,M,H. (2019). *Jurnal Manajemen Keuangan Publik. Studi Kualitatif : Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak dan Penerimaan Negara*, 3(2), 36-45.
- Mandari.N,M,H., Yasa,N,P.,Herawati,N,T. *Mengungkap Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm) Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018*, 9(1), 2614 – 1930
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Jakarta: TMBooks
- Ma'rifah,A,U.(2019). *Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bhayangkara Surabaya.

Nurrohmah,I.(2015). Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Sebelum Dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bmt. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Univeristas Negeri Yogyakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007. 15 Mei 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang *Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Sekretariat Negara. Jakarta. 8 Juni 2018 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89.

Purnomo,P., Palupi,M,S. (2016). *Pengembangan Tes Hasil Belajar Matematika Materi Menyelesaikan Masalah Yang Berkaitan Dengan Waktu, Jarak Dan Kecepatan Untuk Siswa Kelas V*. Vol 20 (2) 151-157

Putri,P,J,N., Iqbal,S. (2020). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Terkait Pemberian Insentif Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018*. Vol 8(2). 1-13

Resmi, S.(2019). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Setiawan,T.(2019). *Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018*.3(4), 463-472

Sugiyono .(2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta

\_\_\_\_\_. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta

\_\_\_\_\_. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor SE-98/PJ/2011 Tentang *Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Laporan Kegiatan Penyuluhan*

*Perpajakan Unit Vertikal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.* 29 Desember 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.* 4 Juli 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.

Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.* 31 Desember 2008. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211.

Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.* 17 Juli 2007. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85

